

MEMAKNAI DISKRIMINASI: PENGALAMAN HIDUP PEREMPUAN TUNANETRA DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI

Ayyub Damran

Universitas Hasanuddin

Dwia Aries Tina Pulubuhu

Universitas Hasanuddin

Nuvida RAF

Universitas Hasanuddin

Alamat:

Departemen Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Korespondensi email: ayyubdamran17@gmail.com

ABSTRACT. *Blind women face discrimination as a complex phenomenon that combines gender inequality and disability stigma. This study examines how they understand and respond to discriminatory experiences in their everyday lives by using a qualitative phenomenological approach. The researcher collected data from eight members of the Indonesian Women with Disabilities Association (HWDI) in Polewali Mandar through interviews, participant observation, and document analysis. The findings show that discrimination appears in family, social, and economic domains, and they experience it as being invisible, being devalued, and losing control over personal life. The informants, however, negotiate these experiences through self-reflection, religious beliefs, and support from HWDI as a place for identity recovery. This study concludes that discrimination does not only happen as a factual event but also works as a social process that shapes self-concept and survival strategies. It emphasizes blind women's role as active subjects and contributes to the literature on disability sociology and inclusive policy development.*

Keywords: *Discrimination, Blind Women, Phenomenology, Social Inclusion*

ABSTRAK. Perempuan tunanetra menghadapi diskriminasi sebagai fenomena kompleks yang menggabungkan ketidaksetaraan gender dan stigma disabilitas. Penelitian ini mengkaji bagaimana mereka memahami dan merespons pengalaman diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Peneliti mengumpulkan data dari delapan anggota HWDI Polewali Mandar melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi muncul dalam ranah keluarga, sosial, dan ekonomi, dan mereka mengalaminya sebagai being invisible, being devalued, serta kehilangan kendali atas hidup pribadi. Informan, namun, menegosiasikan pengalaman tersebut melalui refleksi, keyakinan religius, serta

dukungan HWDI sebagai ruang pemulihan identitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi sebagai peristiwa faktual, tetapi juga bekerja sebagai proses sosial yang membentuk konsep diri dan strategi bertahan. Penelitian ini menegaskan peran perempuan tunanetra sebagai subjek aktif dan memberi kontribusi pada literatur sosiologi disabilitas serta kebijakan inklusif.

Kata kunci: Diskriminasi, Perempuan Tunanetra, Fenomenologi, Inklusi Sosial

PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi masalah serius dalam pembangunan sosial di Indonesia. Pemerintah sudah membuat regulasi dan kebijakan kesetaraan gender, tetapi hambatan struktural dan kultural tetap berlangsung. Afifah (n.d.) menegaskan konstitusi melindungi perempuan dari diskriminasi, tetapi penerapannya belum efektif. Kania (2015) menunjukkan hukum positif menjamin hak-hak perempuan, tetapi praktik sosial sering menghambatnya.

Budaya patriarki membentuk akar diskriminasi gender. Hermawati (2007) dan Rokhimah (2014) menegaskan patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sedangkan Omara (2004) melihat patriarki tampil juga dalam simbol sosial. Sakina dan Siti (2017) menyebut patriarki sebagai faktor dominan yang menghambat kesetaraan gender. Dalam ruang domestik, perempuan sering menghadapi beban ganda. Hidayati (2016) menjelaskan perempuan bekerja terjebak antara tanggung jawab publik dan domestik, dan Ramadhani (2016) menegaskan dampaknya pada relasi keluarga. Wibowo (2011) menambahkan ketidaksetaraan peran membuat masyarakat kurang menghargai kontribusi perempuan.

Akses pendidikan juga menunjukkan ketidaksetaraan. Fitrianti dan Habibullah (2012) menemukan diskriminasi terhadap perempuan di Karawang, dan Zahara, Liestyasari, serta Nurhadi (2015) menyoroti tantangan pendidikan adil gender di pesantren. Budiati (2010) menegaskan nilai budaya sering menghalangi aktualisasi perempuan. Dalam sektor pekerjaan diskriminasi masih berjalan. Khotimah (2009) menunjukkan perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan, Syafe'i (2015) menyoroti dampaknya pada kesejahteraan keluarga, dan Israpil (2017) menelusuri jejak patriarki yang memengaruhi relasi gender hingga kini.

Kekerasan berbasis gender menambah dimensi diskriminasi. Ariyanti dan Ardhana (2020) menemukan korban KDRT di Bali mengalami dampak psikologis mendalam,

sedangkan Susanto (2015) menegaskan patriarki menghambat kesetaraan. UNFPA (n.d.) melalui survei nasional juga menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi.

Karya sastra dan budaya juga memuat diskriminasi. Nasri (2017) menemukan bias gender dalam novel *Padusi*, Unsriana (2014) menyoroti diskriminasi dalam sastra Jepang, sedangkan Permana dan Maulana (2020) mengkaji marginalisasi perempuan dalam cerpen *Inem*.

Konteks lokal memperlihatkan variasi dinamika. Huda (2020) meneliti perempuan Samin di Bojonegoro yang hidup dalam budaya patriarki, dan Nurcahyo (2016) menyoroti keterwakilan politik perempuan. Yusalia (2014) menguraikan tantangan pengarusutamaan gender, sedangkan Hastuti (2005) menegaskan kendala sosial budaya. Laporan Equal Measures 2030 (n.d.) dan UNDP (2019) menegaskan kesenjangan gender di Indonesia masih tinggi.

Dalam perspektif Islam, wacana feminisme ikut berkembang. Kholil (n.d.) menyoroti kritik feminisme pada konsep gender dalam studi Islam, dan Rahminawati (2001) menegaskan bias gender muncul dalam isu kesetaraan. Puspitawati (2012a; 2012b) menekankan analisis gender penting untuk memahami relasi keluarga dan pembangunan sosial. Perempuan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi berlapis. Alimatul Qibtiyah dkk. (2022) menegaskan mereka menghadapi hambatan ganda, dan Dian Utami dkk. (2022) menekankan pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam pembangunan inklusif. Hastuti dkk. (2020) menemukan hambatan struktural membatasi akses pembangunan.

Fenomenologi membantu memahami diskriminasi secara subjektif. Husserl menekankan kesadaran terarah pada pengalaman hidup (Mabaquiao, 2005), dan Padilla (2003) menunjukkan stigma membentuk kesadaran diri penyandang disabilitas. Weber melalui konsep *Verstehen* menekankan makna subjektif yang ada di balik tindakan sosial (Bouterse, 2014). Interaksi simbolik memperkuat analisis diskriminasi. Blumer (1969, dalam Ahmadi, 2008) menegaskan makna sosial lahir melalui interaksi simbolik, dan Mead menekankan refleksi diri melalui simbol signifikan (Siregar, 2011). Sue (2006) menegaskan makna simbolik penting dalam kerja sosial multikultural.

Dari segi metodologi, fenomenologi relevan untuk mengkaji diskriminasi. Creswell (2015; 2023) menegaskan fenomenologi menggali *lived experience*, dan Miles,

Huberman, serta Saldana (2014) menekankan analisis melalui reduksi, display, dan kesimpulan. Siyoto dan Sodik (2015) serta Sugiyono (2013) menegaskan pentingnya pendekatan kualitatif, sedangkan Given (2008) menegaskan penelitian kualitatif memberi ruang pada perspektif kelompok marjinal.

Kerangka ini menjadikan penelitian perempuan tunanetra signifikan. Hutchison (2015) menyebut perilaku manusia dipengaruhi lingkungan sosial, dan Suharto (2006) menegaskan teori feminis relevan untuk menganalisis diskriminasi perempuan disabilitas. Studi fenomenologis ini diharapkan memperkaya literatur sosiologi disabilitas dan mendukung kebijakan inklusif berbasis pengalaman nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan fokus fenomenologi untuk menyingkap pengalaman diskriminasi perempuan tunanetra anggota HWDI Polewali Mandar. Creswell (2023) menyebut penelitian kualitatif berusaha memahami makna subjektif dari masalah sosial, sedangkan Sugiyono (2013) menegaskan sifat interpretatifnya yang menafsirkan data lapangan. Peneliti memilih fenomenologi karena sesuai untuk menggali esensi pengalaman hidup individu. Pendekatan ini membantu peneliti mengungkap makna diskriminasi sebagaimana dialami partisipan, melalui langkah seperti epoche dan horisonalisasi, yang menuntut peneliti mengesampingkan prasangka lalu menyoroti pernyataan penting informan (Creswell, 2015; Given, 2008).

Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebuah daerah dengan karakter sosial budaya dan religius yang kuat, yang membentuk konteks khusus bagi perempuan tunanetra dalam menghadapi diskriminasi. Peneliti memilih lokasi ini juga karena keterlibatan sebagai ASN di Dinas Sosial setempat yang memberi akses luas ke komunitas disabilitas, khususnya HWDI. Namun, peneliti menjaga objektivitas dengan menerapkan prinsip epoche serta menjaga jarak profesional dalam hubungan dengan informan.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis dokumen, dan studi pustaka. Wawancara mendalam menjadi metode utama untuk menggali pengalaman hidup, sedangkan observasi membantu memahami konteks sosial. Dokumen dan literatur ikut memperkuat analisis diskriminasi. Peneliti menentukan informan dengan teknik purposive sampling, terdiri dari perempuan tunanetra sebagai

informan utama, serta keluarga, pemerintah daerah, aktivis disabilitas, dan pengurus HWDI sebagai informan pendukung agar triangulasi sumber memperkuat validitas data.

Peneliti menganalisis data secara interaktif dan berkesinambungan melalui tiga tahap utama: reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data berbentuk naratif untuk menemukan pola, serta penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi sampai hasilnya mantap (Miles et al., 2014; Siyoto & Sodik, 2015). Peneliti menjamin keabsahan data dengan triangulasi sumber, metode, dan teori sehingga temuan konsisten dan terpercaya (Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menampilkan hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui pengumpulan dan analisis data, disusun sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti tidak hanya memaparkan temuan empiris, tetapi juga menghubungkan data dengan konsep teoritis untuk mengungkap makna di balik pengalaman diskriminasi perempuan tunanetra serta menempatkannya dalam kerangka sosiologis yang lebih luas.

Sebelum menguraikan pengalaman diskriminasi, peneliti memperkenalkan profil Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) sebagai konteks. HWDI berdiri sebagai organisasi nasional yang menghimpun dan memberdayakan perempuan penyandang disabilitas, sejak 9 September 1997 di Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sejak awal, HWDI berperan sebagai motor advokasi kesetaraan, mengintegrasikan agenda global ke dalam kebijakan nasional, dan menjalankan program pemberdayaan berbasis komunitas. Di Polewali Mandar, AN, seorang perempuan dengan disabilitas fisik, memulai pembentukan HWDI dengan menginisiasi pertemuan dan menjadikan rumahnya sekretariat. HWDI pusat kemudian mengesahkan upaya ini melalui SK Nomor 020/SK/HWDI/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024.

Diskriminasi terhadap perempuan tunanetra tidak cukup dipahami sebagai peristiwa, tetapi juga sebagai pengalaman bermakna yang mereka hayati secara subjektif. Dalam kerangka fenomenologi, pengalaman diskriminasi menjadi bagian dari *lebenswelt*, dunia kehidupan yang sarat tafsir dan respons aktif individu (Husserl, dalam Padilla, 2003). Dengan pendekatan *verstehen* ala Weber, penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan tunanetra menafsirkan pengalaman diskriminasi, membangun pemahaman tentang diri, dan menentukan strategi perlawanan.

Hasil penelitian menunjukkan diskriminasi hadir dalam berbagai bentuk dan

memengaruhi cara perempuan tunanetra memandang diri serta realitas sosial. Tema utama yang muncul adalah pengalaman “tidak diakui”, yang menggambarkan penghapusan eksistensi dan penyangkalan kapasitas diri. Tema ini menampilkan proses negosiasi makna yang kompleks, ketika mereka berjuang mempertahankan harga diri, martabat, dan posisi sosial dalam struktur masyarakat.

Merasa Tidak Diakui

Tema “merasa tidak diakui” muncul dari pengalaman perempuan tunanetra yang menghadapi keterbatasan ketika mereka mengakses hak-hak dasar, terutama pendidikan. Keluarga yang seharusnya memberi perlindungan justru ikut melanggengkan eksklusi sosial sejak masa kanak-kanak. Hal tersebut tampak dari pengalaman WS (38) yang tidak disekolahkan karena orang tuanya beranggapan bahwa “orang buta tidak perlu sekolah.” Ia menuturkan:

“Ku rasa waktu itu tidak sekolah maka saya, karna mamaku mi yang bilang sendiri. Cuma diam maka saja ku bilang tidak sekolah mungkin memang to buta.”

Artinya:

“Saya merasa waktu itu seperti tidak punya masa depan sekolah, karena ibu sendiri yang bilang saya tidak usah sekolah. Saya hanya diam saja karena saya pikir mungkin memang orang buta tidak boleh sekolah.” (Hasil wawancara dengan WS, 23 Juli 2025)

Makna yang WS sampaikan menunjukkan bahwa ia kehilangan harapan untuk mendapat pendidikan sejak usia dini dan bahwa keputusan keluarga membentuk pandangannya tentang masa depan. Penolakan keluarga untuk menyekolahkannya tidak hanya menutup jalan pendidikan, tetapi juga meneguhkan keyakinan bahwa perempuan tunanetra memang “tidak pantas” menempuh pendidikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keluarga menanamkan stigma yang kemudian ia internalisasi, sehingga diskriminasi berjalan berlapis dan berlangsung lama. AM (48) juga mengalami pengalaman yang sama karena ia tidak mendapat kesempatan bersekolah, berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia menuturkan:

Tidak marah ji Cuma ya lain ka ku rasa. Bisa orang membaca, menulis kerja. Saya begini tappa ji, tapi ya sudahmi ini mi takdirku saya.”

Artinya:

“Saya tidak marah, saya hanya merasa beda saja. Mereka bisa membaca, menulis, bekerja. Saya hanya bisa begini saja. Tapi ya sudah, mungkin memang jalan takdir saya seperti ini.” (Hasil wawancara dengan AM, 23 Juli 2025)

Makna yang AM ungkapkan memperlihatkan bahwa ia pasif menerima keterbatasan akses pendidikan dan peluang hidup. Ia tidak melihat keadaan itu sebagai bentuk ketidakadilan struktural, tetapi menganggapnya sebagai takdir. Keadaan ini memperlihatkan bahwa budaya lokal dapat menanamkan diskriminasi sehingga individu menerima keterbatasan sebagai sesuatu yang wajar. Tema “merasa tidak diakui” juga tampak dalam pengalaman NR yang tidak memiliki KTP karena tidak ada keluarga yang membantunya mengurus. Keadaan itu membuatnya kehilangan akses terhadap bantuan sosial. Ia menuturkan:

“Usa’ding apa’ ndangdiang KTP’u na ndana rua mattarima bantuan, inggana le’ba ma iya ndang dipe’itai apa wattunna diang mi’illonni mappapia KTP ndana mala lamba alaweu ya ndatto’o diang misolangang.”

Artinya:

“Saya pikir mungkin karena saya tidak punya KTP makanya saya tidak dapat bantuan. Saya merasa seperti orang yang tidak dianggap ada, karena waktu ada panggilan untuk rekam KTP saya tidak bisa pergi sendiri dan tidak ada yang menemani.”

(Hasil wawancara dengan NR, 26 Juli 2025)

Pengalaman NR menegaskan bahwa ketiadaan identitas hukum membuat rasa keterasingan semakin kuat. Tidak memiliki KTP tidak hanya menghalangi akses bantuan, tetapi juga menimbulkan perasaan “tidak dianggap ada.” Diam dan pasrah menjadi cara NR merespons, menggambarkan bagaimana diskriminasi yang terus berulang membuatnya menyerah pada keadaan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keluarga dan negara perlu memberi dukungan untuk memenuhi hak-hak sipil penyandang disabilitas. Kisah HA juga memperlihatkan tema serupa ketika ia merasa kontribusinya tidak diakui dan keberadaannya dianggap sebagai beban. Ia menyampaikan:

“Hanya kesedihan ji, ku pikir orang tidak tau rasanya kayak saya. Na anggapka beban saja, pernah maka mau buang diri di air besar. Pengalamanku itu jadi kutau mi siapa yang peduli betulka.”

Artinya:

“Hanya kesedihan, saya pikir mungkin orang tidak tahu rasanya jadi seperti saya, mereka anggap saya hanya beban saya, pernah coba bunuh diri. Bagi saya, itu pengalaman yang membuat saya tahu siapa yang benar-benar peduli.” (Hasil wawancara dengan HA, 26 Juli 2025)

Makna yang diungkapkan HA menunjukkan pergulatan batin yang dalam, ketika ia merasakan diskriminasi bukan hanya sebagai ketidakadilan tetapi juga sebagai tekanan psikologis yang menimbulkan keinginan mengakhiri hidup. Namun, pengalaman ini juga membuatnya berefleksi dan menyadari siapa yang peduli serta siapa yang mengabaikan dirinya.

Secara keseluruhan, tema “merasa tidak diakui” mencakup tiga dimensi utama: pertama, WS dan AM tidak diakui kapasitas dirinya karena ditolak kesempatan bersekolah; kedua, NR tidak diakui hak kewarganegaraannya karena tidak memiliki KTP; dan ketiga, HA tidak diakui kontribusi sosialnya karena dianggap beban. Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat memaknai diskriminasi terhadap perempuan tunanetra bukan sekadar pengalaman personal, tetapi sebagai konstruksi sosial yang menempatkan mereka sebagai “yang lain,” sekaligus memperkuat proses eksklusi dan reproduksi ketidaksetaraan.

Merasa Diremehkan

Tema merasa diremehkan muncul dari pengalaman perempuan tunanetra yang menerima perlakuan merendahkan, dipandang tidak cakap, atau dianggap tidak layak berinteraksi setara. Dalam perspektif fenomenologi, tema ini membuka horizon makna yang menunjukkan bagaimana informan menangkap simbol-simbol sosial yang dilekatkan pada dirinya, seperti cap tidak mampu, tidak bersih, atau menjadi beban. Perlakuan meremehkan tampak bukan hanya dalam ucapan atau tindakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menegaskan posisi mereka sebagai kelompok subordinat. SN menuturkan pengalamannya ketika membeli kue lebaran dan menerima kue dalam keadaan hangus.

“Uala ujiangi, so’naimo lao tau miremehkan, tapi ipokannyangi mibengani tangalalang puang. Ndani uta’gor apa pasti na siallai tau na napauannia loso-losong.”

Artinya:

“Saya lihat itu ujian. Orang boleh meremehkan, tapi saya yakin Allah kasih jalan. Saya juga jadi belajar sabar. Saya tidak mau tegur karna pasti akan berkelahi dia akan tuduh balik saya berbohong.” (Hasil wawancara dengan SN, 26 Juli 2025)

Makna yang disampaikan SN menunjukkan perasaan dipandang rendah yang ia tafsirkan sebagai ujian hidup. Ia tidak larut dalam amarah, tetapi mengartikulasikan pengalamannya melalui bingkai religius dan moral, sambil menekankan kesabaran sebagai cara menjaga martabat. Dengan cara itu, SN tidak hanya menerima diskriminasi, tetapi juga mengolahnya menjadi ruang refleksi dan ketahanan moral. Berbeda dengan SN, RA merasakan diremehkan dalam konteks ekonomi. Ia menceritakan pengalaman ketika pembeli membayar hasil penjualannya dengan uang mainan.

“Na mita togengge mi, mentang-mentang ita di’e tuna netra na micanggo-canggoimi. Tenna uissang memangi minnassa na uallai’i.”

Artinya:

“Saya merasa sangat diremehkan mentang-mentang kami tuna netra jadi mau di tipu. andai saya tahu di awal pasti akan saya marahi,” (Hasil wawancara dengan RA, 19 Agustus 2025)

RA memaknai kejadian ini bukan hanya sebagai kerugian finansial, tetapi juga sebagai pelecehan terhadap martabat dirinya sebagai perempuan tunanetra. Ia melihat peristiwa ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang, ketika disabilitas dipandang sebagai celah untuk merugikan. Dengan mengatakan bahwa ia akan marah jika mengetahuinya sejak awal, RA menunjukkan perlawanan simbolik sekaligus menegaskan bahwa harga diri harus tetap dipertahankan. Sementara itu, DW menafsirkan pengalaman diremehkan dalam ranah yang lebih personal. Ia merasa diperlakukan tidak layak ketika orang lain melarangnya mandi di sumur.

“Miremehkan sannali, rapang le’ba di’e carupu’ sannal ndang diissang mapaccing. Buta’a memang, tapi uissang tobandi mapaccing. Ndio mi lao melo toma iya mappatiroi mala’a mappoleang ndana massara-sarai lao tau.

Artinya:

“Saya merasa seperti diremehkan, seolah saya ini kotor dan tidak tahu kebersihan. Memang saya buta, tapi saya juga tahu menjaga kebersihan. Pengalaman itu membuat saya ingin buktikan kalau saya bisa hidup mandiri dan tidak merepotkan siapa-siapa.” (Hasil wawancara dengan DW, 26 Juli 2025)

Pemaknaan DW menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan hanya soal fasilitas, tetapi simbol penolakan terhadap eksistensinya. Ia tidak merespons dengan menyerah, tetapi menjadikan pengalaman itu sebagai motivasi untuk hidup mandiri dan membuktikan dirinya mampu menjaga kebersihan. Dengan cara itu, perasaan diremehkan yang dialami DW berubah menjadi pemicu untuk menuntut pengakuan sosial.

Secara keseluruhan, tema merasa diremehkan menggambarkan diskriminasi simbolik yang dialami perempuan tunanetra dalam kehidupan sehari-hari. SN menafsirkan pengalamannya sebagai ujian religius yang mengajarkan kesabaran, RA menegaskan perlawanan simbolik terhadap pelecehan martabat dalam ranah ekonomi, sedangkan DW menjadikan stigma kebersihan sebagai motivasi membangun kemandirian. Jika ditarik dalam horizon fenomenologi, ketiga pengalaman ini memperlihatkan bahwa meskipun mereka ditempatkan pada posisi subordinat, perempuan tunanetra tetap menemukan cara untuk mengartikulasikan identitas dan menjaga harga diri melalui kesabaran, perlawanan, maupun pembuktian diri.

Mengalami Kontrol atas Hidup Pribadi

Pengalaman berikutnya datang dari HA yang juga merasakan kontrol dalam ruang domestik. Ia menceritakan bagaimana keluarga mengatur kehidupannya, termasuk aktivitas sehari-hari yang seharusnya menjadi ruang otonomi dirinya.

“Ndakko diurus mi, apa-apa harus tanya, ndak boleh keluar rumah sendiri. Kadang ku rasa na anggap saya tidak mampu apa-apa padahal bisa ji. Hanya karena buta, jadi saya seperti anak-anak terus.”

Artinya:

“Saya selalu diurus, setiap hal harus bertanya dulu, saya tidak boleh keluar rumah sendiri. Kadang saya merasa mereka menganggap saya tidak mampu, padahal saya bisa. Hanya karena saya buta, saya diperlakukan seperti anak kecil terus.” (Hasil wawancara dengan HA, 26 Juli 2025)

Makna yang disampaikan HA menunjukkan bentuk kontrol yang tampak halus tetapi berdampak kuat terhadap harga dirinya. Keluarga menariknya ke posisi ketergantungan permanen dengan tidak mengakui kemandirian yang sebenarnya ia miliki.

Pengalaman ini menggambarkan bagaimana keluarga sering menyamakan kontrol sebagai perhatian, namun dalam horizon makna informan, hal itu justru menegaskan infantilitas penempatan dirinya sebagai sosok yang tidak pernah dewasa. Pengalaman ini juga memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tunanetra tidak hanya hadir dalam keputusan besar seperti menikah atau memiliki anak, tetapi juga dalam ruang kecil kehidupan sehari-hari yang membatasi kebebasan bergerak.

Jika pengalaman RA, SN, dan HA dibaca dalam bingkai fenomenologi, maka tema mengalami kontrol atas hidup pribadi menyingkap ketegangan antara kebutuhan akan otonomi dengan kuasa sosial dan keluarga yang membatasi. RA memaknai larangan menikah dengan sesama tunanetra sebagai penyangkalan atas hak menentukan kebahagiaan. SN menafsirkan pemaksaan penggunaan kontrasepsi sebagai intervensi terhadap tubuh dan hak reproduksinya. Sementara itu, HA mengungkapkan keterbatasan otonomi dalam kehidupan domestik yang membuatnya merasa diperlakukan layaknya anak kecil.

Keseluruhan pengalaman ini menunjukkan bahwa kontrol atas hidup pribadi bagi perempuan tunanetra tidak hanya berupa pembatasan fisik, tetapi juga praktik sosial yang menegaskan otonomi, harga diri, dan eksistensi mereka sebagai individu dewasa. Namun, di balik itu tampak pula upaya reflektif para informan dalam menegosiasikan makna. RA menegaskan hak kebahagiaan personal, SN menggunakan kerangka religius sebagai resistensi simbolik, dan HA menyadari kemampuannya untuk mandiri meski diperlakukan sebaliknya. Dengan cara itu, tema ini memperlihatkan bagaimana kontrol sosial yang membatasi tetap mereka hadapi dengan berbagai strategi makna yang memperkuat identitas sebagai subjek, bukan sekadar objek perlindungan atau belas kasihan.

Mencari Makna dan Kekuatan

Komunitas HWDI tidak hanya menjadi ruang pemulihan, tetapi juga memberi perempuan tunanetra kesempatan menegosiasikan peran mereka di tengah masyarakat. Beberapa informan dalam wawancara menekankan bahwa mereka terlibat dalam organisasi bukan hanya untuk mendapatkan dukungan emosional, tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Makna dari pengalaman diskriminasi tidak berhenti

pada ranah personal, tetapi bergerak menuju kesadaran sosial yang lebih luas. AM merasa bergabung dengan HWDI memberinya ruang untuk dihargai sekaligus belajar tentang pentingnya advokasi. Ia mengatakan:

“Di HWDI na massarangak gauk, na issangak na paccingngi tau. Narekko di luar, na tu-tuduangngi melo, tapi di sini tau massikola’ sitongeng. Jadi makanja saya rasa penting sekali HWDI untuk orang seperti saya.”

Artinya:

“Di HWDI saya merasa ada kegiatan yang bermanfaat, saya juga belajar banyak hal baik. Kalau di luar, sering kali orang meremehkan, tetapi di sini kami saling belajar dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya merasa HWDI sangat penting untuk orang seperti saya.” (Hasil wawancara dengan AM, 21 Agustus 2025)

Makna yang AM tuturkan menunjukkan bagaimana komunitas berperan sebagai arena emansipasi. Ia tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai penerima belas kasihan, tetapi sebagai bagian dari kelompok yang memiliki tujuan bersama. Diskriminasi yang sebelumnya ia alami dalam bentuk penolakan sosial berubah menjadi energi kolektif untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

Pengalaman perempuan tunanetra juga memperlihatkan pergeseran horizon makna dari ketergantungan menuju kemandirian. NR, misalnya, menilai keterlibatannya dalam kegiatan HWDI sebagai momentum untuk mengubah pola hidupnya yang semula terikat pada keluarga menuju kebebasan menentukan arah sendiri. Ia menuturkan:

“Rialo’mi tau di HWDI, jadi na barani makessingngi dirina. Ndanna pole massennangi anre tau, tapi pole attongengngi masselleng dirinta.”

Artinya:

“Setelah bergabung dengan HWDI, saya jadi lebih berani untuk percaya diri. Saya tidak lagi hanya berharap pada orang lain, tetapi mulai sungguh-sungguh berdiri sendiri.” (Hasil wawancara dengan NR, 25 Agustus 2025)

Pernyataan ini menekankan bagaimana informan membangun makna diskriminasi ke arah pembebasan diri. NR tidak tenggelam dalam perasaan ditolak, melainkan melihat pengalaman diskriminasi sebagai tantangan yang mendorongnya membangun kapasitas personal. Transformasi makna ini menunjukkan proses fenomenologis ketika subjek tidak pasif menghadapi realitas, tetapi menafsirkan penderitaan untuk melahirkan horizon baru

yang lebih memberdayakan.

Pengalaman diskriminasi juga melahirkan solidaritas yang melampaui batas individual selain membangun kemandirian. SN menegaskan bahwa ia merasa lebih kuat karena tidak lagi berjuang sendiri. Ia menghubungkan pengalaman diskriminasi dengan kesadaran untuk saling menopang dalam komunitas. Solidaritas ini memberinya modal sosial yang memungkinkan dirinya bertahan dari tekanan sosial yang sering ia hadapi sehari-hari.

Dinamika ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa perempuan tunanetra tidak hanya bertahan dengan cara menyesuaikan diri terhadap diskriminasi, tetapi juga mengubah makna pengalaman tersebut menjadi kekuatan. Dalam kerangka fenomenologi, proses ini tampak sebagai perluasan horizon kesadaran, ketika makna penderitaan bergeser dari “beban” menjadi “sumber daya.” Melalui HWDI, perempuan tunanetra membangun identitas baru, mendapatkan legitimasi sosial, dan menjadikan diskriminasi sebagai titik balik untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih bermartabat.

Strategi Respon terhadap Diskriminasi

Sebagian informan selain memilih diam maupun merespons secara aktif di ruang personal juga membangun strategi kolektif lewat solidaritas dan advokasi. Mereka menyadari bahwa diskriminasi yang mereka alami bukan hanya persoalan individu, melainkan masalah struktural yang menuntut perjuangan bersama. Dalam kerangka ini, organisasi seperti HWDI berfungsi tidak hanya sebagai ruang pemulihan emosional, tetapi juga sebagai arena politik bagi perempuan tunanetra untuk menegaskan keberadaan mereka dalam wacana publik. RA menuturkan:

“Dio di HWDI biasa ada kegiatan sosialisasi, biasa juga undang pejabat. Jadi saya rasa kalau kita bicara sendiri, jarang didengar. Tapi kalau bersama-sama lebih banyak, lebih mungkin didengar.”

Artinya:

“Di HWDI sering ada kegiatan sosialisasi, kadang juga mengundang pejabat. Saya merasa kalau bicara sendiri, jarang ada yang dengar. Tapi kalau kita bicara bersama-sama, lebih mungkin didengar.” (Hasil wawancara RA, 19 Agustus 2025).

Makna yang RA ungkapkan menunjukkan kesadarannya akan pentingnya kekuatan

kolektif. Ia menyadari bahwa orang sering mengabaikan suara individu, sementara suara komunitas lebih mudah membangun legitimasi sosial dan politik. Pergeseran ini menandai perubahan dari strategi bertahan secara personal menuju strategi advokasi kolektif. SN juga melihat kebersamaan dalam organisasi sebagai cara melakukan perlawanan halus terhadap diskriminasi. Ia mengatakan:

“Ndak bisa kita sendiri melawan, tapi kalau banyak orang sama-sama cerita, ada juga yang dengar. Dari HWDI biasa ada pelatihan supaya tau kita hak-hak kita.”

Artinya:

“Kita tidak bisa melawan sendiri, tapi kalau banyak orang sama-sama menyuarakan, ada yang mendengar. Dari HWDI juga sering ada pelatihan supaya kami tahu hak-hak kami.” (Hasil wawancara SN, 26 Juli 2025).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa strategi kolektif bukan hanya soal memperbesar kekuatan suara, tetapi juga sarana edukasi dan peningkatan kesadaran kritis. SN menempatkan dirinya dalam arus gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan, bukan sekadar penyesuaian diri.

Strategi Spiritual: Menemukan Kekuatan dalam Keyakinan

Selain strategi diam, aktif, dan kolektif, beberapa informan juga menekankan pentingnya dimensi spiritual sebagai respon terhadap diskriminasi. Spiritualitas dipahami sebagai sumber makna yang memungkinkan mereka menerima penderitaan tanpa kehilangan harapan. Informan SN menyatakan:

“Sa’bari tau, ujalanimi apa adanya. Ndana melo massara-sarai lao tau, pa’baliannu mo usolangang. Ndani uissang selama tuo mibengangi dalle’ Puang.”

Artinya:

“Saya tetap sabar, saya jalani apa adanya. Saya tidak mau menyusahkan orang lain, lebih baik saya hadapi sendiri. Saya percaya selama masih hidup Allah kasih rezeki.” (Hasil wawancara SN, 26 Juli 2025).

Makna yang SN ungkapkan memperlihatkan strategi spiritual untuk mengolah rasa sakit agar tidak berubah menjadi putus asa. Ia meneguhkan dirinya dengan keyakinan pada Allah, bahkan ketika diskriminasi terus hadir berulang kali.

Temuan tentang strategi respon perempuan tunanetra menunjukkan variasi yang mencakup aspek individual, kolektif, hingga spiritual. Dari sudut fenomenologis, strategi

ini memperlihatkan bagaimana horizon kesadaran mereka berkembang dari bertahan dengan diam dan menerima, menuju pemulihan identitas dengan aktif mencari ruang pembuktian, lalu meluas ke advokasi kolektif melalui organisasi dan spiritualitas melalui keyakinan religius.

Dengan demikian, diskriminasi tidak hanya menghasilkan keterbatasan, tetapi juga memicu kreativitas sosial untuk membangun strategi adaptasi dan resistensi. Diam dapat bermakna sebagai resistensi senyap, kerja dan organisasi dapat berfungsi sebagai pembuktian diri, solidaritas komunitas dapat menjadi advokasi kolektif, dan spiritualitas dapat memberi penguatan batiniah. Seluruh strategi ini menegaskan bahwa perempuan tunanetra adalah subjek aktif yang terus menegosiasikan posisinya dalam struktur sosial yang diskriminatif.

Tabel Tema Utama, Subtema, dan Makna Subjektif Pengalaman Diskriminasi Perempuan Tuna Netra

Tema Utama	Subtema	Makna Subjektif
Merasa Tidak Diakui	- Kapasitas diri tidak diakui (WS, AM) - Hak sebagai warga negara diabaikan (NR) - Kontribusi sosial tidak diakui (HA)	Merasa terpinggirkan sejak dini, dianggap tidak layak sekolah, tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat.
Merasa Diremehkan	- Diremehkan secara ekonomi (RA) - Diremehkan dalam interaksi sosial (SN, DW)	Dipandang rendah, dianggap kotor, diperlakukan tidak adil, menjadi objek peremehan simbolik.
Mengalami Kontrol atas Hidup Pribadi	- Dikendalikan dalam pilihan menikah (RA) - Tubuh dan reproduksi dikontrol (SN)	Kehilangan kebebasan menentukan jalan hidup, pasangan, dan hak reproduksi.
Mencari Makna dan Kekuatan	- Mengubah penderitaan jadi motivasi (ST) - Komunitas sebagai ruang pemulihan (HA, SN, RA)	Menjadikan penderitaan sebagai semangat, menemukan kekuatan lewat solidaritas komunitas.
Strategi Respon terhadap Diskriminasi	- Strategi diam dan menerima (WS, NR, AM, DW) - Strategi aktif: pemulihan & pembuktian diri (HA, SN, ST, RA)	Menggunakan diam untuk menjaga harmoni, beralih ke aksi aktif melalui organisasi, kerja produktif, dan perlawanan simbolik.

Sumber data diolah oleh penulis 2025

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tunanetra tidak hanya hadir sebagai peristiwa, tetapi juga sebagai realitas yang mereka maknai dalam ranah keluarga, sosial, dan ekonomi. Mereka menafsirkan pengalaman diskriminatif sebagai simbol ketidaksetaraan yang menimbulkan rasa being invisible, mendorong sikap menarik diri, atau membatasi interaksi. Namun, mereka memaknai diskriminasi secara dinamis; sebagian melihatnya sebagai ujian yang memberi motivasi, sementara isu kontrol tubuh mereka pahami secara religius sebagai takdir sekaligus peluang untuk memperkuat diri. Sejalan dengan teori interaksi simbolik, mereka membangun makna melalui proses interpretasi dan negosiasi. Penelitian ini juga memperlihatkan peran HWDI sebagai arena interaksi simbolik yang memberi pengakuan, menumbuhkan solidaritas, dan membentuk identitas baru, sehingga perempuan tunanetra bertransformasi dari korban menjadi agen berdaya. Dengan demikian, diskriminasi tidak hanya melahirkan keterasingan, tetapi juga mendorong strategi adaptasi, pembentukan identitas positif, dan ruang bagi transformasi sosial melalui pemberdayaan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. (n.d.). *Perempuan dalam konstitusi Indonesia*.
- Ahmadi, D. (2008). *Interaksi simbolik: Suatu pengantar*. Mediator, 9(2), 301–316.
- Alimatul Qibtiyah, N., dkk. (2022). *Perempuan dan disabilitas: Hambatan ganda dalam kehidupan sosial*. Jurnal Gender dan Inklusi, 14(1), 22–35.
- Ariyanti, D., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(1), 11–21.
- Bouterse, L. J. (2014). *Verstehen and social meaning: Revisiting Weber*. Journal of Classical Sociology, 14(4), 340–356.
- Budiati, A. (2010). Nilai budaya sebagai penghambat aktualisasi perempuan. *Jurnal Perempuan dan Budaya*, 5(1), 45–56.
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage.
- Creswell, J. W. (2023). *Qualitative inquiry and research design* (5th ed.). Sage.
- Dian Utami, A., dkk. (2022). *Pembangunan inklusif berbasis gender dan disabilitas*. Jurnal Inklusi, 9(1), 33–49.

- Equal Measures 2030. (n.d.). *Global report on gender equality*. Equal Measures 2030.
- Fitrianti, N., & Habibullah. (2012). Diskriminasi gender dalam pendidikan di Karawang. *Jurnal Pendidikan dan Gender*, 2(1), 77–88.
- Given, L. M. (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Sage.
- Hastuti, D. (2005). Kendala sosial budaya dalam pengarusutamaan gender di Indonesia. *Jurnal Gender Indonesia*, 1(2), 101–115.
- Hastuti, R., dkk. (2020). Hambatan disabilitas dalam pembangunan inklusif. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 55–67.
- Hermawati, E. (2007). Patriarki dalam budaya Jawa. *Jurnal Budaya Nusantara*, 3(1), 23–34.
- Hidayati, L. (2016). Peran ganda perempuan bekerja. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 4(2), 77–92.
- Huda, A. (2020). Perempuan Samin dan budaya patriarki di Bojonegoro. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 155–168.
- Hutchison, E. (2015). *Affect and emotion: A new social science understanding*. Routledge.
- Israpil. (2017). Sejarah budaya patriarki di Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 11(2), 211–227.
- Kania, D. (2015). Hak-hak perempuan dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 7(1), 56–71.
- Kholil. (n.d.). Kritik feminisme dalam studi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 122–135.
- Khotimah, H. (2009). Diskriminasi gender di dunia kerja. *Jurnal Kesetaraan*, 2(1), 67–81.
- Mabaquiao, N. (2005). Husserlian phenomenology and consciousness. *Philosophy Today*, 49(2), 131–140.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Nasri, Y. (2017). Bias gender dalam novel *Padusi*. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 6(1), 11–20.
- Nurchayyo, R. (2016). Patriarki dan representasi politik perempuan di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(2), 77–94.
- Omara, F. (2004). Patriarki dalam simbol budaya. *Jurnal Antropologi*, 8(1), 44–61.
- Padilla, A. (2003). Phenomenology and disability studies. *Disability & Society*, 18(2), 215–231.
- Permana, A., & Maulana, R. (2020). Marginalisasi perempuan dalam cerpen *Inem*. *Jurnal*

Humaniora, 12(1), 88–97.

Puspitawati, H. (2012a). Analisis gender dan keluarga. Bogor: IPB Press.

Puspitawati, H. (2012b). Konsep gender dalam pembangunan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14(3), 27–40.

Rahminawati, N. (2001). Bias gender dalam isu kesetaraan. *Jurnal Studi Gender*, 6(1), 65–79.

Ramadhani, I. (2016). Peran ganda perempuan dan dampaknya. *Jurnal Psikologi dan Masyarakat*, 8(1), 45–57.

Rokhimah, R. (2014). Budaya patriarki di masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 5(1), 34–50.

Sakina, A., & Siti, K. (2017). Budaya patriarki sebagai penghambat kesetaraan gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 9(1), 20–31.

Siregar, M. (2011). Teori interaksi simbolik George Herbert Mead. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 77–88.

Sue, D. W. (2006). *Multicultural social work practice*. Wiley.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2006). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.

Susanto, T. (2015). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Jurnal Sosiologi dan Gender*, 7(2), 33–48.

Syafe'i, I. (2015). Subordinasi perempuan dalam rumah tangga. *Jurnal Sosial dan Gender*, 4(2), 56–71.

UNDP. (2019). *Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today*. United Nations Development Programme.

United Nations Population Fund. (n.d.). *Survei nasional kekerasan terhadap perempuan*. UNFPA Indonesia.

Unsriana, M. (2014). Diskriminasi gender dalam sastra Jepang. *Jurnal Humaniora Jepang*, 9(1), 12–27.

Wibowo, A. (2011). Ketidaksetaraan peran gender dalam keluarga. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 3(1), 22–39.

Yusalia, D. (2014). Gender mainstreaming dalam budaya patriarki. *Jurnal Kajian Gender*, 10(2), 101–115.

Zahara, R., Liestyasari, D., & Nurhadi. (2015). Tantangan pendidikan adil gender di pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 88–99.